

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA MANADO

THE INFLUENCE OF POPULATION AND PER CAPITA INCOME TO TAX REVENUES RESTAURANTS IN THE CITY OF MANADO

Siska Lestari¹, Vecky A.J Masinambow², Mauna Th. B Maramis³

^{1,2,3} *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia*

Email: ¹ siskalestari2709@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah Pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat di tempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Manado dan karena sifat penduduk Kota Manado yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya, adalah Pajak Restoran. sektor ini merupakan sektor yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jikadikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita terhadap pajak restoran. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2005-2014. dan di analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan tetapi memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak restoran di kota Manado, dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap pajak restoran di kota Manado.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Per Kapita

ABSTRACT

Local government revenue is used to finance the construction comes from several sources, one source of revenue is taxes. To be able to finance and promote the region can be achieved by optimizing a policy of tax revenue, which everyone must pay taxes in accordance with its obligations. One potential area for the tax developed in accordance with the growth and development because of the nature of Manado City Manado City residents who tend consumptive of its food needs, is the restaurant tax. This sector is a sector that is good enough for the reception area if managed properly. This study aimed to analyze the effect of population and per capita income to tax restaurant. The data used in this research is secondary data from the years 2005-2014. and analyzed using multiple regression analysis. The results of this study indicate that a variable number of the population does not have significant influencebut has a positive relation to tax revenues restaurants in the city of Manado,a per capita income has a significant influence, and positively related to tax restaurant in the city of Manado.

Keywords: Tax Restaurants, Population and Per Capita Income

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah diartikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang No 25 Thn 1999) diberlakukannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka Daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk pembiayaan atas pengeluaran yang terjadi.

Perkembangan Keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman Hindia Belanda yakni pada abad ke-15, di mana penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara dekonsentrasi. Waktu itu sistem keuangandaerah ditentukan langsung oleh Gubernur Jenderal dari pusat. Resesi tahun 1922 telah menyebabkan terjadinya penurunan anggaran pemerintah, khususnya untuk keperluan daerah. Untuk itu lalu dikeluarkan peraturan baru yang disebut *bestuurshervormings wet*. Pengaturan tersebut meniadakan pemberian tunjangan dan menggantikannya dengan “*sluitpost*”(sistem menutupi kekurangan).

Sluitpost menganut prinsip “bahwa daerah harus mampu mengurus rumah tangganya sendiri”. Daerah ditugaskan menyusun anggaran belanja secermat mungkin. Jika terdapat kekurangan akan ditutupi dengan budget pemerintah pusat, sebaliknya jika kelebihan harus disetorkan ke Kas Pemerintah Pusat. Dalam tahun-tahun tersebut, telah lahir beberapa ordonansi pajak seperti ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 dan praturan Landrente 1907 yang kemudian diubah dan ditambah menjadi Ordonansi Landrente 1939 (Azhari Aziz Samudra, 2015 : 25).

Ahli-ahli ekonomi pada umumnya sependapat bahwa perkembangan penduduk dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat pembangunan. Ia dipandang sebagai faktor pendorong karena, pertama, perkembangan itu memungkinkan pertambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa. Selanjutnya, pertambahan penduduk dan pemberian pendidikan kepada mereka sebelum menjadi tenaga kerja, memungkinkan sesuatu masyarakat memperoleh bukan saja tenaga kerja yang ahli, akan tetapi juga tenaga kerja yang terampil, terdidik, dan entrepreneur yang berpendidikan. Biasanya ketiga kelompok tenaga kerja yang disebutkan belakangan ini lebih besar jumlahnya apabila tingkat pembangunan bertambah tinggi. Oleh karenanya, pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi, pertambahan penduduk dapat memberikan sumbangan yang lebih besar bagi pengembangan kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno, 2006 : 98).

Distribusi pendapatan merupakan faktor penting lainnya yang menentukan keadaan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pada akhir-akhir ini, dari pengamatan atas hasil-hasil pembangunan dinegara berkembang, makin meluas keasadaran bahwa walaupun dalam sejarah pembangunan negara maju telah terbukti pembangunan ekonomi pada akhirnya akan diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata, pada tingkat permulaan dari pembangunan ekonomi keadaan sebaliknya yang akan berlaku. Perkembangan di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa dalam proses tersebut distribusi pendapatan keadaannya menjadi lebih tidak merata (Sadono Sukirno, 2006 : 58).

Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dibuatoleh pemerintah Kota Manado guna memaksimalkan pendapatan Kota Manado darisektor pajak. Ada sembilan jenis pajak yang diatur di dalam peraturandaerah KotaManado tersebut, yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame, pajak Penerangan jalan, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak Parkir, pajak Air Tanah, dan pajak Sarang Burung Walet. Pemerintah Kota Manado diharapkan mampu memaksimalkan potensi petik pajak yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2011 tersebut guna memaksimalkan pendapatan asli daerah Kota Manado dari sektor pajak. Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola Kota

Manado, yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunann restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. (Devas, 1989) Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kota Manado dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan Cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari Pajak Restoran. Berikut dapat kita lihat perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita masyarakat Kota Manado Tahun 2005-2014.

Tabel 1
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita Masyarakat di Kota Manado Tahun 2005-2014

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	JumlahPenduduk (jiwa)	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2005	6.904.144.590	405715	12.741.678,27
2006	8.926.848.585	417654	15.131.422,18
2007	11.542.143.218	424111	17.186.017,34
2008	14.923.639.490	429149	19.946.025,74
2009	16.690.662.230	434845	23.647.345,61
2010	21.464.517.254	410481	29.043.388,12
2011	26.715.829.539	415114	3.239.311,201
2012	35.362.827.656	417483	3.741.920.025
2013	38.438.945.114	419596	4.234.006,647
2014	40.401.504.799	423257	530.267.471,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sulut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Manado meningkat dari tahun ke tahun Sehingga pajak restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Disamping itu juga pajak restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Manado, karena sifat penduduk Kota Manado yang cenderung konsumtif terhadap kebutuhan pangannya, dan juga Kota Manado merupakan Kota yang sangat strategis untuk berinvestasi Sehingga pendapatan pajak restoran dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Manado, sehingga sektor ini merupakan sektor yang cukup bagus bagi penerimaan daerah jikadikelola dengan baik.

Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Manado

Tinjauan Pustaka

Definisi pajak

Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Siti Resmi, 2009 : 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Teori Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

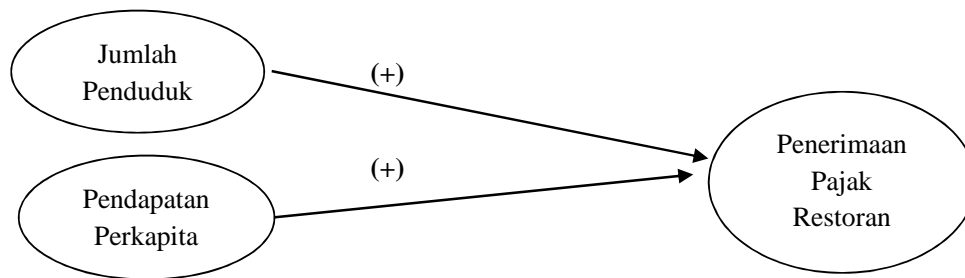
Teori Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) dalam (Devas, 1989) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

Teori Pendapatan Perkapita

Pendapatan Per Kapita (Per Capita Income / PCI) adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam satu periode tertentu. Penghitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam sebuah negara. (Dumairy, 1999)

Kerangka Pemikiran Teoritis



Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk dan pendapatan perkapita masyarakat Kota Manado. Apabila jumlah penduduk dan pendapatan perkapita itu naik, maka penerimaan pajak restoran di Kota Manado akan meningkat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Sulut. Data yang diperoleh adalah data penerimaan pajak restoran, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita Masyarakat Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diestimasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (Regresi Linier). Penggunaan regresi linier bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen, sekaligus untuk mengetahui besaran dan arah tanda variabel-variabel bebas (Ghozali, 2009)

Model analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita masyarakat terhadap penerimaan pajak restoran. Ada dua bentuk persamaan regresi, yaitu sebagai berikut:

$$PR = \beta_0 + \beta_1 JP + \beta_2 PK + e$$

dimana :

- PR = Pajak Restoran
- JP = Jumlah Penduduk
- PK = Pendapatan Perkapita
- β_0 = Konstanta/ Intercept
- β_1 β_2 = koefisien regresi
- e = standart eror

Definisi Operasional Variabel

1. Pajak Restoran Kota Manado adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Jumlah penduduk Jumlah Penduduk Kota Manado adalah banyaknya penduduk yang tinggal/ menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun.
3. Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kota Manado (Per Capita Income / PCI) adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam satu periode tertentu. Penghitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam sebuah negara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Estimasi Model Penelitian

Variabel	Coefficient	t-statistik	Probabilitas
JP	2.029948	0.292285	0.7785
PK	0.368851	3.483688	0.0102
C	-9.086409	-0.101298	0.9222
R ² = 0.644539		F-statistik = 6.346373	

Ket: JP = Jumlah Penduduk
PK = Pendapatan Per Kapita

Sumber: data diolah, 2016

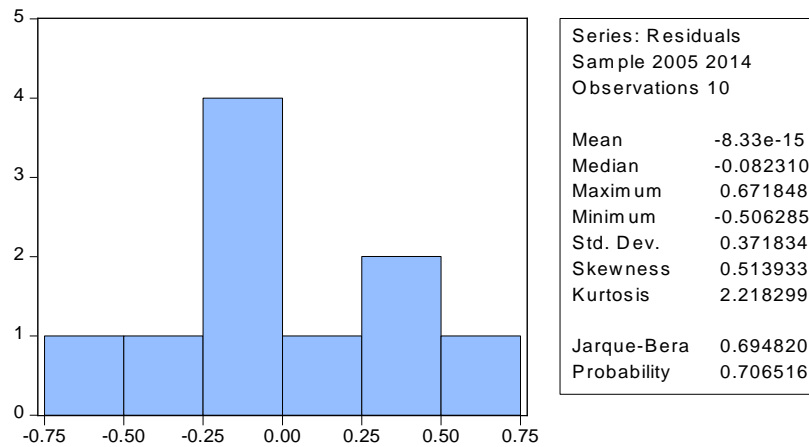
Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 2, maka persamaan regresi dari penelitian ini adalah :

$$PR = -9.086409 + 2.029948 JP + 0.368851 PK + e$$

sehingga dari persamaan regresi ini, maka dapat di interpretasi sebagai berikut :

- pengaruh variabel jumlah penduduk dan pendapatan perkapita secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran. Nilai konstanta sebesar -9.086409 artinya Jika Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita = 0 maka Pajak Restoran sebesar -9.086409.
- Jumlah penduduk mempunyai nilai coefficient sebesar 2.029948 yang berarti jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap pajak restoran. Artinya jika penduduk naik sebesar 1% maka pajak restoran akan naik sebesar 2.029948% Pengaruh tersebut sesuai teori yang menyatakan bahwa Apabila jumlah penduduk naik, maka akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.
- Pendapatan per kapita mempunyai nilai koefisien sebesar 0.368851 yang berarti bahwa pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap pajak restoran. Artinya apabila pendapatan per kapita naik sebesar 1% maka pajak restoran akan naik sebesar 0.368851%. Pengaruh tersebut sesuai teori yang menyatakan bahwa apabila pendapatan per kapita naik, maka pendapatan rata-rata meningkat dalam pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan.

Uji Normalitas



Gambar 3.1
Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar diatas, diperoleh nilai statistik JB sebesar 0.6948 sedangkan nilai Chi Squares dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = 2$ sebesar 5.99. oleh karena itu gagal menolak hipotesis nol bahwa residual didistribusikan secara normal. Dengan kata lain residual hasil regresi pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Restoran mempunyai distribusi normal. Selain itu nilai probability JB hitung sebesar 0.7065 lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF dan Tolerance menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 3 sebagai berikut:

Variabel	VIF	TOL
JP	1.016788	0,9834
PK	1.016788	0,9834

Sumber: Data diolah, 2016

Rumus dari metode VIF dan Tolerance:

$\text{TOL} = \frac{1}{\text{VIF}}$

Ket: TOL= Tolerance
 VIF = Variance Inflation Factors

Dari perhitungan VIF, nilai yang di dapat lebih kecil dari 10 sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas begitu pula nilai TOL mendekati satu sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan metode LM (Lagrange Multiplier) menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 4 sebagai berikut:

R ² =0.399783
Probabilitas Chi squares =0.1355

Sumber: Data diolah,2016

Dari hasil regresi diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R²) sebesar 0.399783 Nilai chi squares hitung sebesar 0.1355 sedangkan nilai kritis pada = 1% dengan df sebesar 5. Karena nilai chi squares hitung < dari pada nilai chi squares tabel, maka dapat disimpulkan model tidak mengandung autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode white test menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 5 sebagai berikut:

R ² =0.359106
Obs*R-squared = 3.591063
Probabilitas Chi Square = 0.1660

Sumber: Data diolah,2016

Dari tabel 5 diketahui bahwa koefisien determinasi (R²) sebesar 0.359106 Nilai chi squares hitung sebesar3.591063yang diperoleh dari informasi Obs*R-squared (jumlah observasi dikalikan dengan (R²)). Di lain pihak, nilai kritis Nilai Chi-squares pada = 5% dengan df sebesar 7 adalah 3.591063 Karena nilai kritis Chi-squares hitung < dari nilai kritis chi squares tabel, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Pembahasan

Uji t-statistik

Pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa Koefisien regresi variabel jumlah penduduk menunjukkan t-hitung sebesar 0.292285 dengan probabilitas sebesar 0,7785 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (0.025), ini berarti koefisien regresi dari variabel independen jumlah penduduk tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pajak restoran pada tingkat $\alpha = 0.025\%$.

Koefisien regresi variabel pendapatan per kapita menunjukkan nilai t-hitung sebesar 3.483688 dengan probabilitas sebesar 0.0102 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05). Ini berarti koefisien regresi dari variabel independen pendapatan per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pajak restoran pada tingkat $\alpha = 5\%$.

Uji F

Uji F ini digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama, apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas (F-statistik) dengan tingkat signifikansi (0,05). terlihat bahwa probabilitas (F-Statistik) lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0.026778 < 0,05$ dengan demikian variabel independen (jumlah penduduk dan pendapatan per kapita) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pajak restoran.

Uji Determinasi R²

Uji R² digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai Adjusted R² hasil estimasi menunjukkan nilai sebesar 0.644539 yang berarti 64.4539% variasi variabel dependen Pajak Restoran dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Jumlah Penduduk dan Pendapatan Per Kapita, sedangkan sisanya 35.5461% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat disimpulkan bahwa Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik sesuai dengan teori yang menyatakan Apabila jumlah penduduk naik, maka akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif. Sedangkan Pendapatan Per Kapita mempunyai pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Restoran, dan signifikan secara statistik. sesuai dengan teori yang menyatakan Apabila pendapatan rata-rata meningkat maka perubahan dalam pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi yang berakibat pada penerimaan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran di Kota Manado, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Wajib pajak, baik orang pribadi atau badan perlu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak atas usahanya dengan tepat waktu dan tidak menggelapkan atau menunda pembayaran pajaknya, khususnya dalam membayar Pajak Restoran.
2. Pemerintah Kota Manado diharapkan mampu memaksimalkan potensi petik pajak guna memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dari Sektor Pajak Restoran.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran selain variabel yang telah digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dumairy, 1999. Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta, BPFE
- [2] Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : UI Press
- [3] Djarwanto Ps, 1982. Statistik Sosial Ekonomi. Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM
- [4] Ghozali, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Empat. Penerbit Universitas Diponegoro
- [5] Peraturan Daerah Kota Manado. No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- [6] Republik Indonesia. Undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- [7] Republik Indonesia. Undang-undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- [8] Republik Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- [9] Resmi, Siti, 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 5 Buku 1. Jakarta, Salemba Empat
- [10] Sadono, Sukirno, 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua. PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- [11] Samudra, Aziz Azhari, 2015. Perpajakan Di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- [12] Widarjono, Agus, 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN, Yogyakarta